



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telepon: 7228901,7393939 email : surat@atrbtn.go.id

Nomor : B/KP.01.01/126-100.2/II/2024
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Pemanggilan Calon Peserta
Orientasi PPPK Gelombang 1 s.d
Gelombang 4 Tahun 2024 dengan
Metode MOOC (*Massive Online Open
Courses*)

Jakarta, 12 Februari 2024

Yth. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
(sebagaimana daftar terlampir)
di Tempat

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 84/ND-100.6.DL.02/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 hal Permohonan Pemanggilan Calon Peserta Orientasi PPPK Gelombang 1 s.d. Gelombang 4 Tahun 2024 dengan metode MOOC (*Massive Online Open Courses*), bersama ini sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Orientasi PPPK Gelombang 1 sampai dengan Gelombang 4 Tahun 2024 dilaksanakan dengan metode MOOC (*Massive Online Open Courses*) pada tanggal 19 Februari sampai dengan 3 April 2024 sebanyak 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua) orang peserta;
2. Daftar peserta, jadwal pelaksanaan dan panduan-panduan dapat dilihat melalui tautan <https://sites.google.com/view/p3k-atrbpn-2024>;
3. Agar Saudara menugaskan para peserta orientasi PPPK sebagaimana dimaksud pada angka 2;
4. Peserta melakukan orientasi PPPK terkait Kurikulum 1 pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-4 melalui Swajar PPPK pada tautan <http://swajar-pppkpintar.lan.go.id/> dengan ketentuan:
Username : Nomor Induk Pegawai (NIP) tanpa spasi
Password : Nomor Induk Kependudukan (NIK) tanpa spasi
5. Peserta mengunggah foto ukuran 3x4 dengan latar belakang merah, memakai kemeja putih dan berdas hitam (bagi yang berhijab memakai kerudung warna putih), ukuran *file* foto maksimal 1 *MegaByte*;
6. Setelah melakukan pembelajaran melalui Swajar PPPK, peserta melakukan *submit* nilai secara mandiri untuk mendapatkan sertifikat melalui Swajar PPPK sebagai syarat untuk melanjutkan pembelajaran di LMS PPSDM;

7. Setelah ...

7. Setelah mendapatkan sertifikat pelatihan dari Swajar PPPK, selanjutnya Peserta melakukan Orientasi PPPK pada hari ke-5 s.d. hari ke-7 melalui LMS PPSDM pada tautan <https://ppsdm.atrbpn.go.id/> dengan ketentuan:

Username : Nomor Induk Pegawai (NIP)
Password : *ppsdm/existing*
Enrollment Key : *ppsdm*

8. Untuk memudahkan koordinasi dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, kami telah menugaskan beberapa narahubung sebagaimana berikut:

GEL	ANGKATAN	GRUP WA	NARAHUBUNG
1	1 – 5	https://bit.ly/PPPK-Angk1-5	Indit, 0851-7226-1420
	6 – 10	https://bit.ly/PPPK-Angk6-10	
2	11 – 15	https://bit.ly/PPPK-Angk11-15	Yuni, 0878-4571-3426
	16 – 20	https://bit.ly/PPPK-Angk16-20	
3	21 – 25	https://bit.ly/PPPK-Angk21-25	Salsa, 0852-1732-3013
	26 – 30	https://bit.ly/PPPK-Angk26-30	
4	31 – 35	https://bit.ly/PPPK-Angk31-35	Helmi, 0821-2399-6181
	36 – 39	https://bit.ly/PPPK-Angk36-39	

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian,


Ir. Deni Santo, S.T., M.Sc., IPU., ASEAN.Eng.
NIP 19700129 199703 1 004

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Bogor.

Lampiran Surat Kepala Biro Organisasi dan
Kepegawaian

Nomor : B/KP.01.01/126-100.2/II/2024

Tanggal : 12 Februari 2024

Kepada Yth.:

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat;
2. Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan;
3. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang;
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
11. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
12. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;
13. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;
14. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten;
15. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu;
16. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta;
17. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;
18. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo;
19. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi;
20. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat;
21. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;
23. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat;
24. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan;
25. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah;
26. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur;
27. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
28. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau;
29. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;
30. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku;
31. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara;
32. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
33. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur;
34. Kepala ...

34. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua;
35. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat;
36. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau;
37. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat;
38. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
39. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah;
40. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara;
41. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara;
42. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat;
43. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan;
44. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.